



Daerah Diminta Anggarkan Pencegahan Klithih

JOG-JA—Kepala daerah di Bumi Mataram diminta melibatkan masyarakat untuk menyosialisasikan kepada warga pentingnya setiap keluarga mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Kabupaten/kota di DIY juga diminta merancang penganggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan.

Sunartono, Ujang Hasanudin, & Yosef Leon
rdaksi@harianjogja.com

- ▶ Sultan meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan lima langkah penanganan.
- ▶ Menurut Sultan ada orang tua dari pelaku kasus *klithih* yang enggan menerima anaknya.

Permintaan itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh DIY melalui Surat Edaran (SE) bernomor 050/5082 tentang pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan. Surat yang ditandatangani Sultan pada Kamis (7/4), ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya peristiwa kejahatan jalanan yang terjadi kekinian, dan telah menelan satu korban jiwa. Melalui edaran ini, secara tegas Sultan meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan lima langkah penanganan.

▶ Halaman 10

PERINTAH SULTAN UNTUK AKHIRI KEKERASAN JALANAN

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait kekerasan di jalanan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Surat bernomor 050/5082 tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan itu ditandatangani Sultan pada Kamis (7/4) dan ditujukan kepada bupati dan wali kota di seluruh DIY.

- Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, kampung, RW, RT, PKK, karang taruna. Dan lain-lain untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya.
- Menginisiasi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja.
- Menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing-masing.
- Bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktivitas hingga lewat tengah malam.
- Menganggarkan aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota di DIY.

Sumber: Surat Edaran Gubernur DIY

Daerah Diminta...

Adapun langkah pertama adalah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, kampung, RW, RT, PKK, karang taruna, dan lainnya lain untuk menyosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga mengetahui keberadaan anggota keluarganya.

Gubernur juga meminta masing-masing kabupaten dan kota agar menganggarkan aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota di DIY. (selengkapnya lihat grafis)

Sebagaimana diketahui aksi kekerasan jalanan telah menewaskan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Jogja Daffa Adzin Albasith pada Minggu lalu. Korban dihantam senjata tajam jenis gir hingga pingsan dan tak sadarkan diri di lokasi hingga meninggal beberapa jam setelah kejadian.

Peristiwa ini pun membuat geger. Tagar *klithih* pun mengemuka di media sosial bahkan sempat menjadi *trending topic*.

Sultan kembali menegaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan jalanan. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini meminta kepada petugas terkait agar menegakkan hukum kepada pelaku kekerasan jalanan yang beberapa di antaranya sudah ditangkap.

Proses hukum harus tetap diberlakukan kepada pelaku meskipun masih di bawah umur.

"Beberapa pelaku kan sudah ditangkap. Mereka harus menjalani proses [hukum], saya hanya ingin hukum ditegakkan, aturan itu sudah ada dari departemen [lembaga] terkait ada. Bagaimana pun pelakunya itu di bawah umur, itu bisa kita selesaikan disidangkan," kata Sultan di DPRD DIY, Jumat (8/4).

Sejumlah institusi mulai dari Kejaksaan, Kepolisian hingga Pengadilan perlu memaksimalkan perannya dalam membantu mengatasi persoalan kejahatan jalanan itu. Para pelaku yang terlibat perlu diperiksa lebih lanjut untuk melihat bagaimana kondisi dan latar belakang keluarganya.

"Ada Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan. Orang yang

pelaku itu kondisinya kehidupan keluarganya bagaimana. Dari situ baru nanti ada keputusan dari pengadilan si anak ini diteruskan atau tidak ke pengadilan. Saya hanya ingin proses hukum ini dilakukan, perkara nanti keputusan dilanjutkan atau tidak," ucap Sultan.

Orang Tua Pelaku

Menurut Sultan ada orang tua dari pelaku kasus *klithih* yang enggan menerima anaknya. Kondisi ini menjadi perhatian bagi Pemda DIY.

Sultan mengatakan Pemda DIY melalui Dinas Sosial serta sejumlah lembaga lainnya sudah menangani anak pelaku kasus kejahatan jalanan. Mereka diberi pembinaan dalam suatu wadah khusus dengan harapan setelah menjalani hukuman berkegiatan positif.

"Dinosos itu juga sudah menangani orang pernah terlibat *klithih*, kekerasan jalanan itu faktanya belum tentu orang tuanya mau terima lagi. Jadi kami juga sudah membina mereka, ada beberapa lembaga yang membina mereka, karena orang tuanya tidak mau terima anaknya lagi," katanya.

Sultan menjelaskan mantan pelaku *klithih* ini harus tetap diberikan perhatian dan pendampingan. Apalagi bagi mereka yang tidak diterima lagi oleh orang tuanya maupun yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Sehingga melalui lembaga terkait Pemda DIY harus siap menjadi pengganti orang tua.

"Itu [pelaku *klithih* yang tidak diterima orangtua] juga harus kita perhatikan, kalau orang tua sudah enggak mau terima lagi, mau kita diaman saja? kan enggak. Ya kita *openi* [rawat]. Karena orang tua tidak mau, ya sudah Pemda sebagai pengganti orang tua," ujarnya.

Sekda DIY Kadaranta Baskara Aji menyatakan ia bersama dinas terkait sudah diberikan instruksi oleh Gubernur DIY agar menangani dengan serius terkait dengan pelaku *klithih* terutama memberikan pembinaan kepada anak yang telah selesai menjalani hukuman. Lantaran kebanyakan pelaku *klithih* usia anak, maka perlu penanganan khusus melalui Dinas P3AP2

DIY dan Dinosos DIY.

Sekda meminta kepada pengurus jajaran hingga tingkat RT agar memantau kondisi lingkungannya. "Jika melihat ada sekumpulan remaja atau anak yang kumpul-kumpul sampai larut malam, harus diingatkan atau dibubarkan," katanya.

Senjata Tajam

Sementara itu, Kepolisian di wilayah Polda DIY menangkap sejumlah orang karena membawa senjata tajam pada malam hari. Kepolisian Sektor Imogiri bersama Polres Bantul menangkap empat orang pelajar di Bulak Dusun Numpukan, Kalurahan Karang Tengah, Imogiri, Bantul, Kamis malam. Polisi menetapkan AH, 17, pelajar SMK sebagai tersangka karena kedapatan membawa gir besi yang dimodifikasi. Sementara tiga pelajar lainnya AA, 17; RA, 16; dan DP, 17 berstatus sebagai saksi dan hanya dibina.

Gir tersebut didapati milik AH, sementara satu gir lainnya berdasarkan pengakuan AH adalah milik temannya berinisial RH, warga Dlingo, yang kini masih dalam penyelidikan polisi. "Gir itu dititipkan temannya yang berinisial RH. Sementara masih kami dalam, kami lacak keberadaannya," ujar Sumanto.

AH yang kedapatan membawa gir mengaku hanya untuk berjaga-jaga. "Tidak ada rencana tawuran. Saya jujur untuk jaga-jaga pak, karena kalau pulang malam suka dikejar di sekitar [Kalurahan] Kebonagung," ucapnya. Ia keluar malam bukan karena bekerja atau urusan sekolah, melainkan hanya bermain.

Di Kota Jogja, seorang pengamen bernama Bagas Pratama, 18, warga Jetis dihajar warga pada Kamis (7/4) malam sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Badran. Warga menduga Bagas menjadi pelaku kekerasan jalanan.

Kepala Seksi Humas Polresta Jogja, AKP Timbul Sasana Raharja menjelaskan Bagas dikeroyok warga karena berjalan sambil membawa sabit sehabis minum cici bersama sejumlah rekannya yang lain. "Senjata tajam yang dibawa oleh pelaku jenis sabit atau arit dan dalam kondisi berkarat serta tidak terawat," kata Timbul, Jumat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005